

RENJA PERUBAHAN

(Rencana Kerja Perubahan)
Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Siliwangi Nomor 65 Telp/Fax (0266) 227440 e-mail : dp3akabsi@gmail.com
SUKABUMI – 43113

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana.

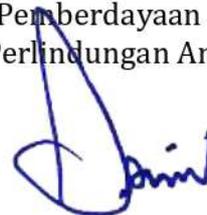
Adapun Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini didasari ketentuan Pasal 83 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini memuat uraian rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sukabumi.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Jawa Barat.

Sukabumi, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,



Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II..... | 11 |
| HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II | 11 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 | 11 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD | 27 |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 32 |
| 2.4 Kajian (<i>Review</i>) terhadap Rancangan Awal RKPD 2023..... | 34 |
| BAB III..... | 41 |
| TUJUAN SASARAN..... | 41 |
| 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional | 41 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran | 44 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 44 |
| BAB IV | 46 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 46 |
| 4.1 Rencana Kerja..... | 46 |
| 4.2 Rencana Pendanaan | 53 |
| PENUTUP..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023. Sedangkan Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 Kabupaten Sukabumi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Disamping itu, dalam rangka melanjutkan mendukung prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2023, substansi Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ditetapkan dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, Rencana Kerja (RENJA) dan Renstra DP3AKB provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional kedalam RAPBD Perubahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan sebagai berikut :

- a. Kepala PD menyiapkan rancangan awal RKPD;
- b. Kepala PD menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD
- c. PD atau Gabungan PD membahas rancangan awal Renja Perubahan PD dalam Forum PD / Gabungan PD. Selanjutnya disusun menjadi Rancangan Renja Perubahan PD yang telah disempurnakan;
- d. Kepala PD mengkoordinir penyusunan rancangan Renja Perubahan PD dengan verifikasi dan sinkronisasi dari Rancangan Renja Perubahan PD yang telah disempurnakan;
- e. Rancangan Perubahan RKPD dibahas dalam Munsrebang RKPD yang diikuti oleh unsur-unsur stakeholder pembangunan;
- f. Kepala PD menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Munsrebang;
- g. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- h. Rencana Kerja Perubahan DP3A tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 -2026 merupakan bagian dari sub system dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.
- i. Secara teknis hubungan Renja Perubahan PD dan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusun Renja PD mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026 dan harus memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : UUD 1945

Landasan Operasional

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

- 33) Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 82);
- 34) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 3);
- 35) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.158-DP3A/2022 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- 36) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk menempatkan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi DP3A Kabupaten Sukabumi dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan;

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di DP3A Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023

2.1.1 Kajian Hasil Evaluasi Renja PD tahun sebelumnya (2022)

Pencapaian Kinerja berdasarkan evaluasi dalam pencapaian indikator kinerja sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.1 dimana terdapat:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

| NO | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 (n-2) | Target dan Realisasi Kinerja PD tahun 2023(Triwulan II) (n-1) | | |
|-----|---|---|--|--|--|-----------|--------|
| | | | | | Target | Realisasi | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (4) | (5) | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 47,27% | 47,27 |
| | <i>Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur</i> | <i>Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur</i> | 100% | 100% | 100% | 43,12% | 43,12 |
| | <i>Meningkatnya disiplin aparatur</i> | <i>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</i> | 100% | 100% | 100% | 28,30% | 28,30 |
| | <i>Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur</i> | <i>Cakupan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan</i> | 100% | 100% | 100% | 25% | 25 |
| | <i>Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur</i> | <i>Cakupan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i> | 100% | 100% | 100% | 42,22% | 42,22 |
| 2 | Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak | <i>Indeks Development Gender (IDG)</i> | 57,45 | 61,52 | 57,68 | - | - |
| | | <i>Kabupaten Layak anak (KLA)</i> | 1000 | 900,15 | 895 | 951,5 | 124,62 |

2.1.2 Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang rinciannya disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DP3A Kabupaten Sukabumi pada Renstra 2021-2026

| No | Indikator | Satuan | Target RENSTRA PD | | | | | | REALISASI | | Proyeksi | | Catatan |
|-----|--|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 (n-2) | 2022 (n-1) | 2023 (n) | 2024 (n+1) | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Nilai | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 80 | 85 | 90 | 495 | |
| 2 | Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga | % | 97,99 | 98,02 | 98,06 | 98,09 | 98,12 | 98,15 | 097,99 | 98,02 | 98,06 | 98,09 | |
| 3 | Tingkat akurasi data gender dan anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait | Rasio | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | |
| 5 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Rasio | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | |
| | Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak | % | 12 | 26 | 26 | 36 | 100 | 100 | 12 | 26 | 26 | 36 | |

Tabel 2.3. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target, realisasi tahun lalu, realisasi sampai dengan tahun lalu, target RPJMD/rencana strategi

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2021 | Realisasi s/d Tahun 2021 | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | % capaian realisasi Tahun Sekarang | Realisasi s/d Tahun 2022 | Target akhir periode RPJMD/ Rentra |
|----------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Sasaran</i> | | Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak | | | | | | |
| 1 | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 80 | - | 85 | - | - | - | 95 |
| 2 | Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga | 97,99 | - | 98,02 | - | - | - | 98,15 |
| 3 | Tingkat akurasi data gender dan anak | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| 4 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait | 0,0187 | - | 0,0187 | - | - | - | 0,0187 |
| 5 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,0032 | | 0,0032 | | | | 0,0032 |
| 6 | Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak | 12 | | 26 | | | | 100 |

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan

- a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : *tidak ada*, pada dasarnya semua program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, dan rata-rata mencapai 99,01%.
- b. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 4.924.728.828 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.875.797.805 dengan persentase di 99,01%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101.796.500 terealisasi sebesar Rp. 101.589.550 atau 99,80% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.267.500 terealisasi sebesar Rp. 16.213.550 atau 99,76% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.500.000 terealisasi sebesar Rp. 6.500.000 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen RKA 1 Dokumen.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.954.000 terealisasi sebesar Rp. 5.954.000 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.435.000 terealisasi sebesar Rp. 3.435.000 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen DPA 1 Dokumen.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.954.000 terealisasi sebesar Rp. 5.954.000 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 42.929.000 terealisasi sebesar Rp. 42.867.000 atau 99,86% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Bulanan SKPD 12 Dokumen.
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.757.000 terealisasi sebesar Rp. 20.666.000 atau 99,56% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.877.327.578 terealisasi sebesar Rp. 3.871.384.388 atau 99,85% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.859.256.078 terealisasi sebesar Rp. 3.853.337.888 atau 99,85% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 668.500 terealisasi sebesar Rp. 668.500 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.422.000 terealisasi sebesar Rp. 11.422.000 atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Keuangan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 18 Dokumen
 4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 5.981.000 terealisasi sebesar Rp. 5.956.000 atau 99,58% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.813.200 terealisasi sebesar Rp. 4.672.975 atau 97,09% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.813.200 terealisasi sebesar Rp. 4.672.975 atau 97,09% Keluaran dari subkegiatan ini adalah :
 - Dokumen Laporan Penatausahaan BMD 12 Dokumen.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.742.200 terealisasi sebesar Rp. 5.742.200 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.742.200 terealisasi sebesar Rp. 5.742.200 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Fasilitasi serta Koordinasi Administrasi Kepegawaian ASN 42 ASN
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 168.290.500 terealisasi sebesar Rp. 164.845.200 atau 97,95% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.166.000 terealisasi sebesar Rp. 5.166.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Komponen Listrik dan Penerangan Bangun Kantor 12 Bulan
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 34.642.250 terealisasi sebesar Rp. 33.320.250 atau 96,18% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 9.411.000 terealisasi sebesar Rp. 9.158.000 atau 97,31% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 28.536.250 terealisasi sebesar Rp. 27.671.250 atau 96,97% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan.
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 33.780.000 terealisasi sebesar Rp. 33.043.700 atau 97,82% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan.

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 12.870.000 terealisasi sebesar Rp. 12.870.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan.
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 43.885.000 terealisasi sebesar Rp. 43.616.000 atau 99,39% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101.796.500 terealisasi sebesar Rp. 101.589.550 atau 99,80% yang terdiri dari :
 1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 43.200.000 terealisasi sebesar Rp. 43.200.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Notebook / Laptop 1 Unit
 - Notebook / Laptop Core i7 2 Unit
 - Printer Epson LQ590 DOTMATRIX 1 Unit
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 450.028.800 terealisasi sebesar Rp. 439.238.960 atau 97,60% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 55.680.000 terealisasi sebesar Rp. 50.188.339 atau 90,24% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan.
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 394.348.800 terealisasi sebesar Rp. 389.050.621 atau 98,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran 12 Bulan

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 273.530.050 terealisasi sebesar Rp. 245.124.532 atau 89,62% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 394.348.800 terealisasi sebesar Rp. 389.050.621 atau 98,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 394.348.800 terealisasi sebesar Rp. 389.050.621 atau 98,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 460.223.500,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 459.397.179,00 dan menghasilkan persentase di 99,82%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 158.873.500 terealisasi sebesar Rp. 158.207.179 atau 99,58% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan anggaran sebesar Rp. 81.413.500 terealisasi sebesar Rp. 80.747.179 atau 99,18% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1 Paket
 - Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1 Paket

- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Kabupaten 60 Orang
 - Pengumpulan Data dan Bahan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1 Paket
 - Rapat Koordinasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Nasional 1 Paket
 - Rapat Koordinasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Provinsi 1 Paket
 - Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 7 Kegiatan
2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 72.110.000 terealisasi sebesar Rp. 72.110.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
- Pendampingan Teknis PPRG bagi Beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Wil. VI (Meliputi 3 Kec. dan 23 Desa/Kel.) 26 Orang
 - Pendampingan Teknis PPRG bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Wil. I (Meliputi 6 Kec. dan 58 Desa/Kel.) 64 Orang
 - Pendampingan Teknis PPRG bagi Perangkat Daerah dan RSUD 38 Orang
3. Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 5.350.000 terealisasi sebesar Rp. 5.350.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor Pokja PUG) 82 Orang
 - Jumlah Peserta Workshop Klinik PPRG 70 Orang
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 211.882.000 terealisasi sebesar Rp. 211.722.000 atau 99,92% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 43.515.000 terealisasi sebesar Rp. 43.515.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pelatihan Sekolah Perempuan Raih Harapan dan Cita – Cita (Sekoper Cinta) 100 Orang
 - Pembentukan Sekolah Perempuan Raih Harapan dan Cita – Cita (Sekoper Cinta) 100 Orang
2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 168.367.000 terealisasi sebesar Rp. 168.207.000 atau 99,90% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Diskusi dan Pengajian Syariah Remaja 50 Orang
 - Jumlah Peserta Musyawarah Daerah – KKPI 50 Orang
 - Jumlah Peserta Musyawarah Daerah –GOW 50 Orang
 - Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan dan Kewirausahaan Pasca Panen Hasil Pertanian – FPPI 50 Orang
 - Jumlah Peserta Peringatan Hari Kartini Tahun 2021 –GOW 100 Orang
 - Jumlah Peserta Peringatan Hari Ibu Tahun 2021 – GOW 100 Orang
 - Jumlah Peserta Seminar Ketahanan Keluarga – FPPI 100 Orang/2 kegiatan
 - Jumlah Peserta Sosialisasi GERMAS untuk Menunjang Kesehatan dan Ketahanan Keluarga –FPPI 60 Orang/2 Kegiatan
 - Kegiatan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 2 Paket
 - Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 1 Paket
 - Kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) 1 Paket
 - Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 1 Paket
 - Kunjungan Kerja KPP ke Padang 1 Paket
 - Rapat Pengurus Inti – GOW 30 Orang
 - Rapat Pengurus Rutin – GOW 50 Orang

- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 273.530.050 terealisasi sebesar Rp. 245.124.532 atau 89,62% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 54.728.000 terealisasi sebesar Rp. 54.728.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Kunjungan Kerja ke UPT PPA Provinsi Jawa Barat 30 Orang
 - Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik UPT PPA 1 Paket
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.4740.000 terealisasi sebesar Rp. 3.4740.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 100 Orang
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Motivator 61 Orang
 - Seleksi Wanita Inspiratif di Bidang Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Budaya 1 Paket

3. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 376.293.100,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 373.098.830,00 dan menghasilkan persentase di 99,15%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 153.683.100 terealisasi sebesar Rp. 153.288.830 atau 99,74% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 153.683.100 terealisasi sebesar Rp. 153.288.830 atau 99,74%

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Bimtek Pencegahan dan Penanganan Trafficking bagi Babinsa dan Babinkabtimnas 100 Orang
 - Community Watch / Penanganan TPPO Berbasis masyarakat 5 Kecamatan
 - Penanganan Trafficking TPPO (Pemberian bantuan kepada korban TPPO) 8 Orang
 - Rakor Gugus Tugas TPPO Tingkat Kabupaten Sukabumi 100 Orang
 - Sosialisasi Reguler Meeting 25 Orang
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 216.275.000 terealisasi sebesar Rp. 21.3475.000 atau 99,71% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 216.275.000 terealisasi sebesar Rp. 21.3475.000 atau 99,71%
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Oprasional Pendampingan Dan Penjangkauan Korban
 - Mediko Legal Pemeriksaan Hidup
 - Mediko Legal Pemeriksaan Luar
 - Mediko Legal Pemeriksa Penunjang
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 6.335.000 terealisasi sebesar Rp. 6.335.000 atau 100% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 6.335.000 terealisasi sebesar Rp. 6.335.000 atau 100%
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 1.723.924.200,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.723.411.485,00 dan menghasilkan persentase di 99,97%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.589.989.200 terealisasi sebesar Rp. 1.589.716.485 atau 99,98% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 149.062.200 terealisasi sebesar Rp. 148.789.485 atau 99,82% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 100 KK
 2. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.440.927.000 terealisasi sebesar Rp. 1.440.927.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Apresiasi Kegiatan Kalau Minggu Kumpul Keluarga (Kapulaga) 120 Orang
 - Jumlah Peserta Evaluasi Kalau Minggu Kumpul Keluarga (Kapulaga) di Lokasi P2WKSS 30 Orang
 - Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kalau Minggu Kumpul Keluarga (Rakor Kapulaga) 30 Orang
 - Jumlah Peserta Sosialisasi Kalau Minggu Kumpul Keluarga (Kapulaga) di Lokasi P2WKSS 100 Orang
 - Hibah Kepada Lembaga Organisasi DWP dan PKK
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 133.935.000 terealisasi sebesar Rp. 133.695.000 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 133.935.000 terealisasi sebesar Rp. 133.935.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Bimtek KUBE PEKKA 150 Orang
 - Kelompok PEKKA 30 Kelompok
 - Peningkatan kapasitas Pendamping Lapangan 10 Orang

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 110.144.250,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 109.177.569,00 dan menghasilkan persentase di 99,39 %. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 110.144.250 terealisasi sebesar Rp. 109.477.569 atau 99,39% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 110.144.250 terealisasi sebesar Rp. 109.477.569 atau 99,39% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Diseminasi Profil Gender 50 Orang
 - Jumlah Peserta Penganalisaan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 60 Orang/3 Kegiatan
 - Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Data Sistem Informasi Gender dan Anak (Rakor Data SIGA) 50 Orang

- Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data Kekerasan 300 Orang/3 Kegiatan
- Pendataan Bahan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 50 Instansi/Lembaga

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 249.854.750,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 249.622.250,00 dan menghasilkan persentase di 99,91%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 174.974.750 terealisasi sebesar Rp. 174.742.250 atau 99,39% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 174.974.750 terealisasi sebesar Rp. 174.742.250 atau 99,87% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pembentukan Kampung Ramah Anak (4 kali kegiatan) 200 Peserta
 - Sosialisasi KLA (4 kali kegiatan) 200 Peserta

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 528.870.750,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 502.565.750,00 dan menghasilkan persentase di 95,03%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.

90.963.750 terealisasi sebesar Rp. 90.963.750 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 79.763.750 terealisasi sebesar Rp. 79.763.750 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Penanganan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak 60 Korban
 - Diseminasi Pencegahan dan Penanganan Kejahatan / Kekerasan Terhadap Anak 100 Orang
 - Kampanye dan Deklarasi Bersama Stop Perkawinan Anak 50 Orang
 - Pertemuan Lintas Sektor Tk. Kabupaten Sukabumi 50 Orang
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.1200.000 terealisasi sebesar Rp. 1.1200.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO 40 Orang
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 328.320.000 terealisasi sebesar Rp. 305.462.000 atau 93,04% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 172.255.000 terealisasi sebesar Rp. 149.397.000 atau 86,73% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Pendampingan Bagi Perempuan Korban Kekerasan oleh Lembaga P2TP2A 25 Korban
 - Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan oleh Lembaga P2TP2A 150 Korban

- Jumlah Lokasi Workshop Penanganan Kasus 11 Kecamatan
 - Kunjungan Kerja P2TP2A 1 Paket
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 156.065.000 terealisasi sebesar Rp. 156.065.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Pendampingan Dan Penjangkauan Korban 150 Orang
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 109.587.000 terealisasi sebesar Rp. 106.140.000 atau 96,85% yang terdiri dari:
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 109.587.000 terealisasi sebesar Rp. 106.140.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Pemeriksaan Korban Hidup (Medikolegal) 16 Orang
 - Pemeriksaan Luar (Medikolegal) 3 Orang
 - Pemeriksaan Dalam/Autopsi 1 Orang
 - Pemeriksaan Penunjang (Medikolegal) 16 Orang
 - Visum et Psikiatrium 16 Orang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan PD

Hasil evaluasi target pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Pada tahun 2021 masih terjadi pandemik covid 19 yang

mengakibatkan adanya refocusing anggaran. Hal itu dikarenakan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pencegahan penularan covid 19 di berbagai daerah di kawasan kabupaten sukabumi. Oleh karena itu rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta dengan anggarannya mengalami perubahan dari rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebuah kebijakan tanpa disertai anggaran akan sulit mencapai tujuannya dengan baik, tampaknya hal ini disadari penuh oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihadapi oleh DP3A Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan internal dan informasi public
 - 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.

- 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- 1) Belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
 - 6) Belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan dan Kesetaraan gender.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak :
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak :
- 1) Masih belum seluruh anak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.

- 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita.
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan Keadilan gender di daerah.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF, USAID MADANI, IOM.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait

perempuan dan anak.

5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan bagi perempuan.
- c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
- d. Masih terjadinya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
- e. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
- f. Belum dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar.
- g. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.

- h. Tingginya Unmetneed KB.
- i. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah.
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

2.4 Kajian (*Review*) terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

2.4.1 Proses Pengkajian

Proses pengkajian Rencana awal RKPD 2023 dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun Triwulan ketiga tahun 2021 sampai dengan Triwulan pertama tahun 2022, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa penambahan perubahan yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang dilakukan oleh intern Perangkat Dinas dalam rangka optimalisasi kinerja dan efisiensi Anggaran, proses yang dilakukan meliputi:

1. Pengajuan Usulan Kegiatan;

Kegiatan diajukan oleh masing-masing bidang dan sekretariat, Kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2023 diproyeksikan untuk mendukung pencapaian kinerja Indikator Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan RENSTRA tahun 2021 – 2026.

2. Analisis kebutuhan berdasarkan target kinerja kegiatan yang diusulkan dan perkiraan target yang akan dicapai;

Proses ini dilakukan agar Output dan Outcome yang diajukan bisa menunjang pencapaian target kinerja

3. Penyesuaian *Output* dan *Outcome* kegiatan untuk menunjang pencapaian target kinerja sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA yang telah ditetapkan.

Proses ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil daripada analisa Kebutuhan

2.4.2 Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan

Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan Pelaksanaan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi di Tahun Anggaran 2022 dan nilai capaian kegiatannya disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kegiatan dan Target Kinerja DP3A tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) |
|----|---|--|
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD |
| | | Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD |
| | | Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja |
| | | Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan |
| | | Dokumen Rencana Aksi Kinerja |
| | | Dokumen Rencana Kerja |
| | | Dokumen Rencana Kerja Perubahan |
| | | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan |
| | | Dokumen Rencana Strategis |
| | 2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA - SKPD |
| | 2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen RKA Perubahan - SKPD |
| | 2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Dokumen DPA - SKPD |
| | 2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dokumen DPA Perubahan - SKPD |
| | 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan |
| | | Dokumen Penginputan SIPD |
| | | Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan |
| | | Dokumen Penyusunan Manajemen Resiko |
| | | Dokumen Rekonsiliasi Data Perencanaan |
| | 2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Dokumen SPIP |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi E - Sakip |
| | | Laporan Evaluasi Kinerja |
| | | Laporan Tahunan Dinas |
| | | LPPD |
| | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji Dan Tunjangan ASN |
| | 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen Laporan Keuangan Bulanan SKPD |
| | | Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD |
| | | Dokumen Laporan Keuangan Triwulan SKPD |
| | | Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan Intern |
| | 2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD |
| | 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | 2.08.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan RKBMD |

| | |
|--|--|
| 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| 2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen Kepagawaian |
| 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Penerangan |
| 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hekter kecil no.10 |
| | Stabilo |
| | Lakban Coklat Uk. Besar |
| | LAKBAN BENING BESAR |
| | Map biola Ukuran Folio |
| | Double Tape |
| | isi hekte kecil no.10 |
| | Map Plastik Folio |
| | Lakban Hitam Uk. Besar |
| | Buku Folio |
| | Spidol Whiteboard Hitam |
| | Stop Map Polio (Biasa) Uk. Standar, Bahan Karton |
| | Buku agenda |
| | Balpoint Biasa |
| | Odner |
| | binder Klip 155 |
| | Stop Map Snelhekte Uk. Folio, Bahan Plastik |
| | sticky notes |
| | Spidol Permanet Hitam |
| | Balpoint Boliner |
| | Label Stick Note Joyko |
| | Amplop Putih Uk. 10,5 x 22,5 cm Jaya |
| | Fotokopi Hitam Putih Kertas HVS A4/ F4 Uk. 70 Gram |
| | Baterai Alkaline , ukuran AAA isi 2 buah/set |
| | Baterai 9 volt persegi |
| | Flash Disk 64 Gb |
| | Kertas F4 70 Gram |
| | Kertas F4 80 gram |
| | Kertas A4 80 Gram |
| | Kertas Warna F4 70gram |
| | Kertas Warna A4 70gram |
| | Kertas A4 70gsm |
| | Materai @Rp. 10.000 |
| | Cartridge HP Laserjet Compatible Compatible Printer HP |
| | Tinta Printer Epson Black/Color Original |
| 2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat Kebersihan |
| | Alat Kesehatan |
| | Alat Perabot Kantor |
| 2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Belanja Cetak |
| 2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Belanja Jasa Publikasi , Dokumentasi , Dan Belanja Jasa Kantor |
| 2.08.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu | Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah |
| | | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah |
| | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Biaya Jaringan Komunikasi Data |
| | | Biaya tagihan air |
| | | Biaya tagihan internet |
| | | Biaya tagihan listrik |
| | | Biaya tagihan telepon |
| | 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Dai Majelis Talim pengajian Aparatur |
| | | Honorarium Pegawai Non ASN, beserta jaminan kecelakaan, kematian dan kesehatan pegawai non ASN |
| | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Mobil |
| | | Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Motor |
| 2 | 2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Peserta Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) |
| | | Jumlah Peserta Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) |
| | | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Kabupaten |
| | | Pengumpulan Data dan Bahan Penginputan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) |
| | | Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) |
| | 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Peserta Advokasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Kebonpedes |
| | 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor POKJA PUG) |
| | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Peserta Pelantikan Pengurus Periode 2021-2026 dan Seminar Ketahanan Keluarga - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) |
| | | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) |
| | | Jumlah Peserta Peringatan Hari Ibu 2022 - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |
| | | Jumlah Peserta Peringatan Hari Kartini 2022 - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |
| | | Jumlah Peserta Pertemuan Rutin dengan Anggota - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |
| | | Jumlah Peserta Rapat Kepengurusan - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |

| | | |
|---|---|--|
| | | Jumlah Peserta Rapat Pengurus Inti - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) |
| | | Jumlah Peserta Rapat Pengurus Pleno - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) |
| | | Jumlah Peserta Sosialisasi PHBS dalam menunjang Kesehatan dan Ketahanan Keluarga - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) |
| | | Jumlah Peserta Sosialisasi Produk Hukum Urusan PPPA - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) |
| | | Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perempuan Kader Partai - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) |
| 3 | 2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | DAK NON FISIK (BOPPA PENCEGAHAN KTPA/TPPO PEREMPUAN) |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | DAK NON FISIK (BOPPA PELAYANAN KTPA/TPPO PEREMPUAN) |
| | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | DAK Non FISIK (BOPPA MANAJEMEN KTPA/TPPO PEREMPUAN) |
| | | Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan |
| | | Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan / TPPO |
| 4 | 2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Bantuan Cat |
| | | Evaluasi Tingkat Kabupaten |
| | | Evaluasi Tingkat Provinsi |
| | | Rakor Tingkat Kabupaten |
| | | Rakor Tingkat Kecamatan |
| | 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |

| | | |
|---|---|--|
| | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembentukan Kelompok PEKKA |
| | | Pelatihan Kelompok PEKKA |
| | 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Bimtek TOT Fasilitator |
| | | FGD |
| | | Jingle Perahu Kertas |
| | | Pelatihan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan & Sosial |
| | | Pembelajaran , Ekonomi, Kesehatan , Pendidikan & Sosial |
| | | Pembentukan Kelompok Perahu Kertas |
| | | Sosialisasi (Launching) |
| | | Wisuda |
| 5 | 2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | |
| | 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Analisis Profil Gender dan Anak Tahun 2021 |
| | | Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap Perempuan dan Anak |
| | | Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap Perempuan & Anak |
| 6 | 2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota | |
| | 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembentukan Kampung Ramah Anak |
| | | Sosialisasi Kabupaten Layak Anak |
| | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Talkshow |
| | 2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rakor Gugus Tugas KLA |
| | | Rakor Gugus Tugas Per Klaster |
| 7 | 2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |

| | |
|---|--|
| 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kordinasi Dan Konsultasi Pencegahan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak |
| 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota | DAK Non FISIK (BOPPA PENCEGAHAN KTPA/TPPO ANAK) |
| | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Early Warning System |
| | Kunjungan Kerja |
| | P2TP2A Goes To Campus |
| | Penanganan Kasus Anak |
| | Penanganan Kasus Perempuan |
| | Sosialisasi Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Untuk Satgas Kecamatan |
| 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | DAK NON FISIK (BOPPA PELAYANAN KTPA/TPPO ANAK) |
| | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| 2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DAK NON FISIK (BOPPA MANAJEMEN KTPA/TPPO ANAK) |

BAB III

TUJUAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan fokus pembangunan tahun 2021 – 2026 yaitu pembangunan ekonomi berbasis kawasan, Kabupaten Sukabumi menetapkan 5 prioritas pembangunan, antara lain :

1. Ekonomi
 - a. Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
 - b. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
2. Sosial : Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
3. Pemerintahan : Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan public
4. Infrastruktur : Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
5. SDM : Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan

Berkaitan dengan ke-5 fokus tersebut, peranan perempuan tentu saja cukup berarti dalam pembangunan. Perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian, politik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, wanita memiliki 35% usaha kecil dan menengah, yang mana jenis usaha inilah yang memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, data dari FAO menunjukkan bahwa 42% perempuan Indonesia aktif dalam kegiatan hulu ke hilir dalam kegiatan budidaya perikanan. Dari segi partisipasi politik, proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di 19,8%.

Keberadaan perempuan yang di masa kini menduduki jabatan penting di pemerintahan maupun dunia bisnis merupakan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Walaupun demikian, hal ini dinilai belum cukup karena kondisi perempuan di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih memprihatinkan diantaranya karena belum terpenuhinya semua hak, masih adanya perlakuan diskriminatif, kurangnya akses, masih adanya perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan perdagangan orang, belum tercapainya kuota 30% perempuan di legislatif, dan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia saat ini. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana mengubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Salah satu contohnya yaitu pola pikir bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena hanya berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Data dari Susenas KOR 2015 menunjukkan persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berjumlah 21,51%, lebih besar dibandingkan laki-laki yang berjumlah 15,51%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang disebabkan oleh preferensi orangtua menyekolahkan anak laki-laki. Terdapat pula kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki diberikan gaji yang lebih tinggi karena dianggap sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan merupakan pendamping yang hanya menyokong penghasilan suaminya. Faktanya, data Susenas 2014 dari BPS menunjukkan terdapat sekitar 14,84% rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai hal, baik dalam aspek regulasi maupun program-program yang inovatif. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan perempuan diantaranya adalah program *Coding Mum* atau pelatihan bahasa pemrograman dari Badan Ekonomi Kreatif yang diharapkan dapat memberikan peluang bagi ibu rumah tangga untuk bekerja paruh waktu sebagai *programmer*.

Selain itu, terdapat Gerakan *HeForShe* dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan

laki-laki dalam upaya melindungi perempuan, pemenuhan hak-hak serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Selain itu, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan perempuan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dalam hal bantuan dana usaha untuk meningkatkan kualitas ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi dalam hal revitalisasi pusat studi wanita untuk melakukan riset terkait pembangunan daerah, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, peran perempuan dalam pembangunan dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup terutama akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan hukum, perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik serta untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan terkait pembangunan nasional baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi atau kelompok tertentu serta di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, diperlukan strategi komprehensif dalam memberdayakan perempuan di Indonesia. Upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pihak swasta, pelaku ekonomi serta masyarakat umum termasuk keluarga.

Kedepannya diharapkan akan lebih banyak lagi program pemberdayaan bagi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan/UMKM serta pemanfaatan teknologi mutakhir yang mencakup semua wilayah dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah yang tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga perempuan sehingga para perempuan dapat berperan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan responsif gender.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari :

1. Indeks Development Gender (IDG)
2. Kabupaten Layak anak (KLA)

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi Kepala Daerah di arahkan pada pencapaian tujuan pada tahun 2023 sesuai dengan masa Renstra yaitu untuk Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius. Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan: Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: “Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga” dengan strategi “Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan” melalui:

1. Indeks Developmen Gender (IDG);
2. Kabupaten Layak anak (KLA).

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terdiri dari :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hokum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan.
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

- Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayahnya
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 disusun berdasarkan pada RENSTRA 2016 – 2021 yang sudah dilakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 untuk memenuhi target IKU tahun 2023. Maka diperkukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terpenuhinya IKU tersebut.

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi implementasikan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |
|----------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| 11 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| 12 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 13 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 14 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| | | |
|----------|---|---|
| | 15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | 16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| | 17 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | 18 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 19 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | 22 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | 26 | Pemeliharaan Mebel |
| | 27 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | |
| 1 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG |
| | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
| | 4 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 5 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
| | 6 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
| 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | 7 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 8 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| 4 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota | |
| | 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota |

| | | |
|----------|--|---|
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 11 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | |
| | 5 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 12 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 13 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 6 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | 14 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | |
| | 7 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 15 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | |
| | 8 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 16 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 9 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 17 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 18 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | |
| | 10 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | 19 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 20 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 11 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 21 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 22 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | 12 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | 23 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |

4.1.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target indikator Kinerja utama DP3A Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 ditentukan berdasarkan capaian-capaian kinerja kegiatan pada Perangkat daerah yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026, target IKU pada tahun 2023 ditampilkan pada table 4.2

Tabel 4.2 Target IKU DP3A Kabupaten Sukabumi tahun 2023

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Kinerja Awal | | Target | | | | | Kondisi Kinerja Akhir |
|---|--|---------------------------------|--------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Tujuan (1) Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius | Sasaran (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Point | 87,37 | 87,44 | 87,64 | 87,78 | 87,92 | 88,06 | 88,2 | 88,2 |

Tabel 4.2 Target IKU DP3A Kabupaten Sukabumi tahun 2023

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Kinerja Awal | | Target | | | | | Kondisi Kinerja Akhir |
|---|--|---------------------------------|--------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Tujuan (1) : Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius | Sasaran (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Point | 87,37 | 87,44 | 87,64 | 87,78 | 87,92 | 88,06 | 88,2 | 88,2 |

Tabel 4.3 Target IKU DP3A Kabupaten Sukabumi tahun 2023

| NO | TUJUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR SASARAN RENSTRA | STRATEGI | KEBIJAKAN UMUM | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN | | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | | | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius. | Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga | 1 Indeks Developmen Gender (IDG) | Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan | Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran perempuan dan perlindungan anak | point | 57,07 | 57,68 | 57,37 | 57,52 | 57,45 | 57,45 |
| | | | 2 Kabupaten Layak anak (KLA) | | | Nilai | 830 | 895 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 |

Tabel 4.4 Target IKU Program DP3A Kabupaten Sukabumi tahun 2023

| NO | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | FORMULASI | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN | | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|--------------------------------------|---|--|------------|---|--------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga | 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Nilai | Pratama 50,25 sd.63,74, Madya 63,75 sd. 77,24 Utama. 77,25 sd. 90,74 Mentor ≥ 90,75 | 75 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |
| | | 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Persen (%) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100% | 4,46 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | |
| | | 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga | Persen (%) | Jumlah sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga / Jumlah sasaran Keluarga binaan dikali 100% | 98,02 | 98,6 | 98,09 | 98,12 | 98,15 | 98,15 | |
| | | 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Tingkat akurasi data gender dan anak | Persen (%) | jumlah data hasil rekonsiliasi / jumlah data gender dan anak x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak | Persen (%) | Jumlah Desa/Kelurahan yang ditetapkan / jumlah seluruh Desa x 100% | 26 | 26 | 36 | 100 | 100 | 100 | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait | Persen (%) | Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) Korban kekerasan yang ditangani / didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100 (populasi anak) | 0,012 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
|--|--|--|---|---------------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Rencana Kerja 2023

4.2 Rencana Pendanaan

Rencana Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 disajikan pada table 4.4.

Tabel 4.4. Rencana Kegiatan dan Pendanaan tahun 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Praktoran Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Capaian Program | Kelebaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Kelebaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | Sebelum | Sesudah | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | 10.064.639.833 | 11.570.164.835 | | | | 26.207.647.834 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pegustian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 9 | Dokumen | 9 | Dokumen | | | 0 | 0 | | | | | 100.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | | | | 360.000.000 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pegustian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Perentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dukungan pemenuhan persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | persen | 100 | persen | 9 | Dokumen | 9 | Dokumen | 100 | persen | 100 | persen | 33.842.600 | 33.842.600 | | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 11.000.000 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | | | | 360.000.000 | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Perentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dukungan pemenuhan persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | persen | 100 | persen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100 | persen | 100 | persen | 3.500.000 | 3.500.000 | | 15.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Perentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dukungan pemenuhan persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | persen | 100 | persen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100 | persen | 100 | persen | 3.500.000 | 3.500.000 | | 15.000.000 |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | sesuai peraturan Perundang-undangan | Perubahan RKA-SKPD | waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | sesuai peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|---|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 06 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | | 5.000.000 | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | | | | | 360.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dukungan pemenuhan penerteban perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 5.000.000 | 5.000.000 | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 15.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | | 7.000.000 | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | | | | | 360.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dukungan pemenuhan penerteban perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 5.000.000 | 5.000.000 | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 15.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | | 7.000.000 | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | | | | | 360.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Wacana Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktikar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktikar Realisasi Kinerja SKPD | Dukungan pemenuhan penerteban perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 persen | 100 persen | 95.000.000 | 95.000.000 | | Dana Transfer Umum-Dana Abdiad Umum | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 150.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum- | | 20.000.000 | | | | | | |

Rencana Kerja 2023

| Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | Dana Abikasi Umum | | | | | | | | |
|--|----|----|------|--|---|---|--|---|--|------------|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 155.842.600 | 155.842.600 | 368.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Ditujukan pemenuhan persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 persen | 100 persen | 10.000.000 | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pemenuhan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 50.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | | | 20.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | | | 4700.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 3.668.479.583 | 4.300.879.785 | 6.065.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN | Ditujukan Pemenuhan Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 100 persen | 100 persen | 3.668.479.583 | 4.277.679.785 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 6.000.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan ke Bulanan, Triwulanan Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD | usangan n' an Laporan dan Laporan /Semesteran | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | | | 10.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 3.668.479.583 | 4.300.879.785 | 6.065.000.000 | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Ditujukan Pemenuhan Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 persen | 100 persen | 5.000.000 | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 persen | 23.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|-----------------------------|---------------|-----|------------|------------|------------|---------|---------|----------------------|---|---|---|------------|----------------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD | Dukungan Pemenuhan Anggaran | Kab. Sukabumi | 100 | 100 | 18 Laporan | 18 Laporan | 100 | 100 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | | | 10.000.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 3.668.479.583 | 4.300.879.785 | | | | 6.065.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD | Persentase Pelaksanaan Restrukturisasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD | Dukungan Pemenuhan Anggaran | Kab. Sukabumi | 100 | 100 | 18 Laporan | 18 Laporan | 100 | 100 | 10.000.000 | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Restrukturisasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 | 30.000.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | 1 | 1 | Dokumen | Dokumen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | | | 12.000.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 3.668.479.583 | 4.300.879.785 | | | | 6.065.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Persentase Pelaksanaan Restrukturisasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dukungan Pemenuhan Anggaran | Kab. Sukabumi | 100 | 100 | 1 | 1 | Dokumen | Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Restrukturisasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan | 100 | 10.000.000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | 36.000.000 | | | | 25.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 08 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase pelaksanaan penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dukungan Pemenuhan Anggaran | Kab. Sukabumi | 100 | 100 | 1 | 1 | Laporan | Laporan | 30.000.000 | 30.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | Persentase pelaksanaan penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 | 23.000.000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.03 | 08 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12 | 12 | Laporan | Laporan | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abdi Masyarakat | | | 7.000.000 | |
| Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | 62.750.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 09 | Persediaan dan Pengalokasian Administrasi | Cakupan Pelaporan Administrasi | Jumlah Dokumen Persediaan dan Pengalokasian | Dukungan Pemenuhan Anggaran | Kab. Sukabumi | 100 | 100 | 1 | 1 | Dokumen | Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 | Dana Transfer Umum- | Cakupan Pelaporan Administrasi | 100 | 62.750.000 |

Rencana Kerja 2023

| | | | | Kepegawaian | Kepegawaian | Administrasi Kepegawaian | yang Memiliki Keahlian Kompetensi | Semua Kelurahan | | | | | | | | | | Dana Abstrak Umum | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---|---------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 08 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | | 0 | 0 | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | 7.000.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | 5.000.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | | | | | | 1.028.044.234 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisidakan | dukung pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | | | | Kab Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Paket | 1 Paket | 100 persen | 100 persen | 11.500.000 | 11.500.000 | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 150.000.000 | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Pengadaan Perangkat dan Kelengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | | | | | | 1.028.044.234 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Pengadaan Perangkat dan Kelengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | dukung pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | | | | | | 100 persen | 100 persen | | | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 150.000.000 | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 03 | Pengadaan Perangkat Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | 5.000.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | | | | | | 1.028.044.234 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 03 | Pengadaan Perangkat Rumah Tangga | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Paket Perangkat Rumah Tangga yang Didisidakan | dukung pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | | | | Kab Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Paket | 1 Paket | 100 persen | 100 persen | 5.000.000 | 5.000.000 | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 108.084.334 | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Pengadaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | 75.000.000 | | | | | | | | | | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------------------------------------|---|---|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | 1.028.094.234 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Pengadaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didialokan | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Paket | 1 Paket | 100 persen | 100 persen | 125.000.000 | 125.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 150.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 15.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | 1.028.094.234 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didialokan | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Paket | 1 Paket | 100 persen | 100 persen | 10.000.000 | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 75.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Pengadaan Bahan Baku dan Pelebaran Perundang-undangan | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 50.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | 1.028.094.234 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Pengadaan Bahan Baku dan Pelebaran Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pelebaran Perundang-undangan yang Didialokan | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 68.000.000 | 68.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 125.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 7.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | 1.028.094.234 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perkantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 persen | 100 persen | 30.000.000 | 30.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran | 100 persen | 70.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 75.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 309.500.000 | 329.500.000 | | | | | 1.028.094.234 | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|--|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perantoran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan umum pelayanan perantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 persen | 100 persen | 80.000.000 | 80.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perantoran | 100 persen | 200.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 96.000.800 | | | | | 49.914.800 |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 00 | Pengadaan Perabot dan Meja Lainnya | Cakupan Pelayanan Administrasi Perantoran | Jumlah Unit Perabot dan Meja Lainnya yang Didisain | dukungan pemenuhan persentase sarana dan prasarana kantor | | | 100 persen | 100 persen | 1 Unit | 1 Unit | 100 persen | 100 persen | 0 | 90.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Cakupan Pelayanan Administrasi Perantoran | 100 persen | 49.914.800 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | | | 175.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 660.237.600 | 702.557.400 | | | | | 716.898.800 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisain | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 persen | 100 persen | 114.000.000 | 114.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | 100 persen | 175.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | | | 550.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 660.237.600 | 702.557.400 | | | | | 716.898.800 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisain | dukungan pemenuhan persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 persen | 100 persen | 546.237.600 | 588.537.400 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perantoran | 100 persen | 541.898.800 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 346.500.000 | 381.300.800 | | | | | 450.000.000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang Dibayarkan Pajak dan Perizannya Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Mobil Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Motor | dukungan pemenuhan persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 0 Unit & unit | 0 Unit & unit | 100 persen | 100 persen | 321.500.000 | 358.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi Umum | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 100 persen | 400.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | dukungan pemenuhan persentase sarana dan prasarana kantor dalam | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 40 Unit | 40 Unit | 100 persen | 100 persen | 25.000.000 | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abikasi | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 100 persen | 50.000.000 | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | Kondisi Awal | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | | | | |
|---|----|----|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|---------------|-------------|
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | 590.000.000 | 635.755.000 | | | | | | | | | | | | | | | 2.800.000.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 265.000.000 | 265.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 900.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Tingkat Pelaksanaan Koordinasi Parahyta Ekapraya | Kab. Sukabumi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 nilai/skor | 90 nilai/skor | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 90.000.000 | 90.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 nilai/skor | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 265.000.000 | 265.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 900.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Tingkat Pelaksanaan Koordinasi Parahyta Ekapraya | | 90 nilai/skor | 90 nilai/skor | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 100.000.000 | 100.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 nilai/skor | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 08 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PRG | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 265.000.000 | 265.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 900.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 08 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PRG | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Tingkat Pelaksanaan Koordinasi Parahyta Ekapraya | | 90 nilai/skor | 90 nilai/skor | 35 Perangkat Daerah | 35 Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 25.000.000 | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 nilai/skor | 200.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Pendekatan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) | 90 juta/tikor | 90 juta/tikor | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 100 persen | 100 persen | 25.000.000 | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 juta/tikor | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | | | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | 1.200.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Peningkatan ketahanan Keluarga melalui Pendekatan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) | 90 juta/tikor | 90 juta/tikor | 55 Orang | 55 Orang | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 juta/tikor | 400.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | | | 75.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | 1.200.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Pendekatan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) | 90 juta/tikor | 90 juta/tikor | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) | 90 juta/tikor | 700.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kabupaten, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum | | | 125.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 50.000.000 | 110.000.000 | | | | 325.000.000 |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------|--|--|-------------|
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,0032 poin | 0,0032 poin | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,0032 poin | 125.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,0032 poin | 0,0032 poin | 47 Peringkat Daerah | 47 Peringkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 30.000.000 | 110.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,0032 poin | 200.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Pengabdian Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | 0,0032 rasio | 0,0032 rasio | | | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,0032 rasio | 50.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Pengabdian Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,0032 rasio | 0,0032 rasio | 0 Layanan | 0 Layanan | 100 persen | 100 persen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,0032 rasio | 50.000.000 | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 | | | |

Rencana Kerja 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 08 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 0 | 0 | | | Dana Transfer Umum- Dana Abseki Umum | 150.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 10.064.639.833 | 11.970.164.835 | | | 20.207.647.834 | |

BAB V

PENUTUP

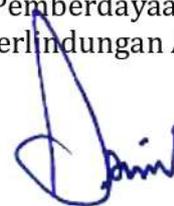
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) DP3A Kabupaten Sukabumi disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan, nomenklatur Program / Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 50-5889 Tahun 2021.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Bidang-bidang di lingkungan DP3A, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya Renja Perubahan digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sukabumi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur Renja Perubahan, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada Input (masukan), namun lebih ditekankan kepada *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil), *Benefit* (manfaat) dan *Impact* (pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sukabumi, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,



Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680805 198803 1 001